

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada pemerintah daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Neraca Saldo
- D. Laporan Operasional;
- E. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- F. Catatan atas Laporan keuangan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai:

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi.
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- a. Ekuitas awal Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan
- b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiscal / keuangan dan ekonomi makro;

- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
- i. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah ;

- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- m. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II : Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.
- BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.
- BAB IV : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD
- BAB V : Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULSEL

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

I. Pendapatan

Berkenaan dengan kebijakan keuangan yang diatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk ulang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari segi pendapatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel ditargetkan dalam pendapatan asli daerah berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan nilai target pendapatan sebesar Rp.12.840.000,- di tahun 2022.

II. Belanja

Dari segi belanja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel untuk Tahun Anggaran 2022 melaksanakan Kegiatan Belanja Daerah dan Pembiayaan. Dari segi neraca, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel sebagai pengguna aset dan melakukan pencatatan atas aset tetap serta melakukan pengadaan sesuai kebutuhan pada setiap kegiatan belanja daerah yang secara administrasi perhitungan neraca terpusat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun posisi keuangan periode Tahun Anggaran 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel mendapat alokasi belanja daerah sebesar Rp.12.594.062.044,00 yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp.12.093.715.044,00 dan terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp.7.297.048.974,00 serta belanja barang dan jasa sebesar Rp.4.796.666.070,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp.500.347.000,00 yang anggarannya bersumber dari APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.12.327.990.178.00 dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp.266.071.866.00 dengan realisasi anggaran belanja daerah sampai 30 Desember

2022 mencapai Rp.12.127.012.879,89 atau 96,26% dengan sisa anggaran sebesar Rp.467.049.164.11, pada belanja tersebut dapat dijabarkan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal yang memiliki 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
					Keu	Fisik
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7
	BELANJA DAERAH	12,594,062,044.00	12,127,012,879.89	(467,049,164.11)	96.29	100.00
	BELANJA OPERASI	12,093,715,044.00	11,638,038,166.89	(455,676,877.11)	96.23	100.00
	BELANJA MODAL	500,347,000.00	488,974,713.00	(11,372,287.00)	97.73	100.00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,512,248,744.00	10,149,786,112.89	(362,462,631.11)	96.55	100.00
①	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	595,694,950.00	579,774,599.00	(15,920,351.00)	97.33	100.00
	Masukan :	Dana yang terealisasi Rp.579.774.599,00				
	Keluaran :	Persentasi keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu 100%				
	Hasil :	Persentasi terpenuhinya dokumen perencanaan dan penganggaran 100%				
	Sumber Dana :	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAK Non Fisik Adminduk				
	Lokasi:	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	285,798,000.00	279,470,694.00	(6,327,306.00)	97.79	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,559,000.00	4,658,174.00	(900,826.00)	83.80	100.00
		Sudah terpenuhi jumlah cetak yang dibutuhkan				
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,166,200.00	5,125,425.00	(40,775.00)	99.21	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,701,200.00	5,664,576.00	(1,036,624.00)	84.53	100.00
		Nilai harga satuan dalam DPA berbeda dengan nilai harga satuan di e-katalog (Aplikasi Baju Bodo)				
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6,475,000.00	5,914,078.00	(560,922.00)	91.34	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,761,150.00	14,020,778.00	(740,372.00)	94.98	100.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271,234,400.00	264,920,874.00	(6,313,526.00)	97.67	100.00
②	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,450,971,474.00	7,258,674,112.00	(192,297,362.00)	97.42	100.00
	Masukan :	Dana yang terealisasi Rp.7.258.674.112,00				
	Keluaran :	Persentasi keterpenuhan laporan administrasi Keuangan tepat waktu 100%				
	Hasil :	Ketersediaan laporan administrasi keuangan perangkat daerah 100%				
	Sumber Dana :	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi:	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,297,048,974.00	7,113,664,516.00	(183,384,458.00)	97.49	100.00
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33,174,000.00	31,849,214.00	(1,324,786.00)	96.01	100.00
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29,163,000.00	27,457,601.00	(1,705,399.00)	94.15	100.00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	74,951,500.00	69,292,051.00	(5,659,449.00)	92.45	100.00

12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16,634,000.00	16,410,730.00	(223,270.00)	98.66	100.00
③	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	66,830,000.00	59,358,604.00	(7,471,396.00)	88.82	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.59,358,604.00 Persentasi keterpenuhan laporan administrasi barang milik daerah 100% Ketersediaan laporan administrasi barang milik daerah 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	53,873,500.00	47,209,714.00	(6,663,786.00)	87.63	100.00
		SPD untuk kegiatan lembur tidak terbit				
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,956,500.00	12,148,890.00	(807,610.00)	93.77	100.00
④	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	435,172,600.00	404,566,262.00	(30,606,338.00)	92.97	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.404.566.262,00 Persentasi keterpenuhan pegawai 100% Ketersediaan kebutuhan pegawai 100% Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAK Non Fisik Adminduk Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42,350,000.00	42,080,000.00	(270,000.00)	99.36	100.00
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	131,543,600.00	120,944,312.00	(10,599,288.00)	91.94	100.00
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	206,129,000.00	189,792,100.00	(16,336,900.00)	92.07	100.00
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55,150,000.00	51,749,850.00	(3,400,150.00)	93.83	100.00
⑤	Administrasi Umum Perangkat Daerah	682,577,400.00	622,279,517.89	(60,297,882.11)	91.17	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.622.279.517,00 Persentasi keterbutuhan administrasi umum 100% Ketersediaan kebutuhan administrasi umum 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229,127,000.00	228,057,150.89	(1,069,849.11)	99.53	100.00
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,045,500.00	2,995,335.00	(50,165.00)	98.35	100.00
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00	100.00
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78,548,800.00	74,040,748.00	(4,508,052.00)	94.26	100.00
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357,919,600.00	303,341,059.00	(54,578,541.00)	84.75	100.00
		Perjalanan dinas sudah terpenuhi sesuai volume				
24	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	11,536,500.00	11,445,225.00	(91,275.00)	99.21	100.00
⑥	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15,130,000.00	15,130,000.00	-	100.00	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.15.130.000,00 Jumlah pengadaan barang milik daerah 47 unit Tersediannya barang milik daerah 17 unit Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
25	Pengadaan Mebel	15,130,000.00	15,130,000.00	-	100.00	100.00

⑦	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	642,346,720.00	608,462,419.00	(33,884,301.00)	94.72	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.608.462.419,00 Persentasi pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100% Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00	100.00
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542,346,720.00	508,462,419.00	(33,884,301.00)	93.75	100.00
⑧	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	623,525,600.00	601,540,599.00	(21,985,001.00)	96.47	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.601.540.599,00 Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 44 unit Persentasi tersedianya pemeliharaan barang milik daerah 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	85,080,000.00	77,792,850.00	(7,287,150.00)	91.43	100.00
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	137,585,600.00	126,791,225.00	(10,794,375.00)	92.15	100.00
30	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18,860,000.00	18,860,000.00	-	100.00	100.00
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	382,000,000.00	378,096,524.00	(3,903,476.00)	98.98	100.00
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	469,472,000.00	445,415,244.00	(24,056,756.00)	94.88	100.00
⑨	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	170,300,000.00	155,820,134.00	(14,479,866.00)	91.50	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.155.820.134,00 Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk 100% Persentase peningkatan pemahaman peserta 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
32	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	120,300,000.00	110,704,950.00	(9,595,050.00)	92.02	100.00
33	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	50,000,000.00	45,115,184.00	(4,884,816.00)	90.23	100.00
⑩	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	99,900,000.00	95,712,967.00	(4,187,033.00)	95.81	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.95.712.967,00 Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100% Persentase peningkatan pemahaman apartur disdukcapil kab/kota terkait pelayanan pendaftaran penduduk 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
34	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	99,900,000.00	95,712,967.00	(4,187,033.00)	95.81	100.00

⑪	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	199,272,000.00	193,882,143.00	(5,389,857.00)	97.30	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.193.882.143,00 Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100% Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
35	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	199,272,000.00	193,882,143.00	(5,389,857.00)	97.30	100.00
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	428,690,000.00	403,626,995.00	(25,063,005.00)	94.15	100.00
⑫	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	325,000,000.00	302,748,474.00	(22,251,526.00)	93.15	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.302.748.474,00 Persentasi Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil 100% Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
36	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	83,205,000.00	78,614,279.00	(4,590,721.00)	94.48	100.00
37	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	241,795,000.00	224,134,195.00	(17,660,805.00)	92.70	100.00
⑬	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	103,690,000.00	100,878,521.00	(2,811,479.00)	97.29	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.100.878.521,00 Persentasi yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil 100% Persentase peningkatan pemahaman aparatur disdukcapil kab/kota terkait pelayanan pencatatan sipil 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
38	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	103,690,000.00	100,878,521.00	(2,811,479.00)	97.29	100.00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	583,651,300.00	545,132,462.00	(38,518,838.00)	93.40	100.00
⑭	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	128,000,000.00	118,906,386.00	(9,093,614.00)	92.90	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.118.906.386,00 Persentase pengelolaan data kependudukan skala provinsi 100% Persentase peningkatan pemahaman aparatur disdukcapil kab/kota terkait pelayanan pencatatan sipil 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
39	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/kota	128,000,000.00	118,906,386.00	(9,093,614.00)	92.90	100.00
⑮	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	197,404,100.00	177,770,209.00	(19,633,891.00)	90.05	100.00
	Masukan : Keluaran : Hasil : Sumber Dana : Lokasi:	Dana yang terealisasikan Rp.177.770.209,00 Persentase Kab/Kota/OPD/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100% Persentase peningkatan pemahaman aparatur disdukcapil kab/kota terkait penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100% Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				

40	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	86,414,500.00	76,704,200.00	(9,710,300.00)	88.76	100.00
	Perjalanan dinas sudah terpenuhi sesuai volume					
41	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	110,989,600.00	101,066,009.00	(9,923,591.00)	91.06	100.00
⑩	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	258,247,200.00	248,455,867.00	(9,791,333.00)	96.21	100.00
	Masukan :	Dana yang terealisasikan Rp.248.455.867,00				
	Keluaran :	Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100%				
	Hasil :	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100%				
	Sumber Dana :	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi:	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
42	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	190,268,200.00	184,093,617.00	(6,174,583.00)	96.75	100.00
43	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	67,979,000.00	64,362,250.00	(3,616,750.00)	94.68	100.00
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	600,000,000.00	583,052,066.00	(16,947,934.00)	97.18	100.00
⑪	Penyediaan Profil Kependudukan	600,000,000.00	583,052,066.00	(16,947,934.00)	97.18	100.00
	Masukan :	Dana yang terealisasikan Rp.583.052.066,00				
	Keluaran :	Persentasi ketersediaan profil dan data kependudukan skala provinsi 100%				
	Hasil :	Ketersediaan profil dan data kependudukan 4 dokumen				
	Sumber Dana :	Pendapatan Asli Daerah				
	Lokasi:	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang				
44	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	600,000,000.00	583,052,066.00	(16,947,934.00)	97.18	100.00

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara umum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam hal hampir setiap kegiatan ada beberapa yang sisa SPD-nya tidak terbit dan menyebabkan tidak terlaksananya realisasi kegiatan tersebut dan rata-rata pada belanja perjalanan dinas dengan mengikuti volume perjalanan yang mengakibatkan terdapatnya sisa anggaran perjalanan serta penyiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berakselerasi dengan cepat sejalan dengan dinamika perkembangan penduduk dan paradigma masyarakat.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULSEL

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Pendapatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel, mengelola pendapatan asli daerah berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditargetkan selama 12 bulan pada tahun anggaran 2022 dengan nilai pendapatan sebesar Rp.12.840.000,00 dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Uraian	Pagu Pendapatan	Penerimaan	Sisa Penerimaan	%
1	2	3	4	5	6
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.12.840.000,00	Rp.12.840.000,00	Rp.0,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.12.840.000,00	Rp.12.840.000,00	Rp.0,00	100,00

3.1.2. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel mendapat belanja yang dimasukan dalam laporan realisasi anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

BELANJA	TA. 2022		TA. 2021
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp.12.594.062.044,00	Rp.12.127.012.879,89	Rp.11.874.018.180,00

Anggaran belanja senilai Rp.12.594.062.044,00 dan realisasi senilai Rp.12.127.012.879,89 atau 96,29% dan untuk tahun 2021 dengan realisasi Rp.11.874.018.180,00 dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA	TA. 2022		TA. 2021
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.12.093.715.044,00	Rp.11.638.038.166,89	Rp.11.553.003.780,00
Belanja Modal	Rp.500.347.000,00	Rp.488.974.713,00	Rp.321.014.400,00
	Rp.12.594.062.044,00	Rp.12.127.012.879,89	Rp.11.874.018.180,00

3.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp.11.638.038.166,89 atau 96,23% dari anggaran Rp.12.093.715.044,00 dan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.11.553.003.780,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	TA. 2022		%	TA. 2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Pegawai	Rp.7.297.048.974,00	Rp.7.113.664.516,00	97,49	Rp.7.471.928.041,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.4.796.666.070,00	Rp.4.524.373.650,89	94,32	Rp.4.081.075.739,00
Jumlah	Rp.12.093.715.044,00	Rp.11.638.038.166,89	96,23	Rp.11.553.003.780,00

3.1.2.a.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel sebesar Rp.7.297.048.974,00 dapat direalisasi sebesar Rp.7.113.664.516,00 atau 97,49% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.183.384.458,00.

Rincian Belanja Pegawai T.A. 2022 yang terbagi atas belanja PNS dan PPPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp.2.546.511.329,00	Rp.2.500.468.744,00	Rp.46.042.585,00	98,19
2.	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp.66.087.200,00	Rp.66.087.200,00	Rp.0,00	100,00
3.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp.222.988.804,00	Rp.220.001.404,00	Rp.2.987.400,00	98,66
4.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp.6.287.344,00	Rp.6.287.344,00	Rp.0,00	100,00
5.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp.143.725.000,00	Rp.137.769.800,00	Rp.5.955.200,00	95,86
6.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp.59.554.000,00	Rp.59.269.960,00	Rp.284.040,00	99,52
7.	Belanja Tunjangan Fungsional umum PNS	Rp.89.875.000,00	Rp.88.760.000,00	Rp.1.115.000,00	98,76
8.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp.4.360.000,00	Rp.4.360.000,00	Rp.0,00	100,00
9.	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp.136.176.758,00	Rp.133.759.740,00	Rp.2.417.018,00	98,23
10.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp.5.214.240,00	Rp.5.214.240,00	Rp.0,00	100,00
11.	Belanja Tunjangan pph/Tunjangan khusus PNS	Rp.12.603.776,00	Rp.11.626.489,00	Rp.977.287,00	92,25
12.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp.36.802,00	Rp.36.064,00	Rp.738,00	97,99
13.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp.1.796,00	Rp.1.796,00	Rp.0,00	100,00
14.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	Rp.105.084.527,00	Rp.102.799.838,00	Rp.2.284.689,00	97,83
15.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp.2.733.666,00	Rp.2.685.704,00	Rp.47.962,00	98,25
16.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp.5.246.804,00	Rp.5.128.344,00	Rp.118.460,00	97,74
17.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp.141.261,00	Rp.138.782,00	Rp.2.479,00	98,25
18.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Rp.15.740.508,00	Rp.15.385.196,00	Rp.355.312,00	97,74
19.	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	Rp.423.785,00	Rp.416.353,00	Rp.7.432,00	98,25
20.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	Rp.3.874.256.374,00	Rp.3.753.467.518,00	Rp.120.788.856,00	96,88
	Jumlah Belanja Pegawai	Rp.7.297.048.974,00	Rp.7.113.664.516,00	Rp.183.384.458,00	97,49

3.1.2.a.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel tahun 2022 sebesar Rp.4.796.666.070,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.4.524.373.650,89 atau 94,32%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.272.292.419,11.

Rincian Belanja Barang dan Jasa T.A. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	1.873.596.550,00	1.850.257.497,00	23.339.053,00	98,75
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	135.405.600,00	129.339.250,00	6.066.350,00	95,52
	Belanja Alat Tulis Kantor	347.184.750,00	341.362.355,00	5.822.395,00	98,32
	Belanja Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	90,00
	Belanja Bahan Cetak	160.013.400,00	157.514.019,00	2.499.381,00	98,44
	Belanja Bahan Komputer	57.574.000,00	55.966.725,00	1.607.275,00	97,21
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.051.020.000,00	1.048.604.400,00	2.415.600,00	99,77
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	78.548.800,00	74.040.748,00	4.508.052,00	94,26
	Belanja Pakaian KORPRI	42.350.000,00	42.080.000,00	270.000,00	99,36

2.	Belanja Jasa Kantor	944.545.024,00	845.377.654,00	99.167.370,00	89,50
	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	181.800.000,00	139.700.000,00	42.100.000,00	76,84
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	429.600.000,00	409.600.007,00	19.999.993,00	95,34
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	75.981.024,00	69.583.372,00	6.397.652,00	91,58
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50.000.000,00	49.900.000,00	100.000,00	99,80
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	20.000.000,00	10.428.275,00	9.571.725,00	52,14
	Belanja Lembur	79.964.000,00	58.966.000,00	20.998.000,00	73,74
3.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.765.696,00	29.279.040,00	7.486.656,00	79,64
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	33.419.952,00	26.892.240,00	6.527.712,00	80,47
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	1.486.992,00	1.060.800,00	426.192,00	71,34
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN	1.858.752,00	1.326.000,00	532.752,00	71,34
4.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Sewa Audio Visual	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00
5.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.120.000,00	83.676.550,00	2.443.450,00	97,16
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.260.000,00	64.816.550,00	2.443.450,00	96,37
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Personal Computer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
6.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.564.861,89	1.435.138,11	99,28
	Belanja Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II	200.000.000,00	198.564.861,89	1.435.138,00	99,28
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.641.138.800,00	1.502.718.048,00	138.420.752,00	91,57
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.614.468.800,00	1.499.059.668,00	115.409.132,00	92,85
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.550.000,00	3.658.380,00	19.891.620,00	15,53
	Jumlah	4.796.666.070,00	4.524.373.650,89	272.292.419,11	94,32

Keterangan :

- Pada penyerapan realisasi Belanja Jasa Kantor sudah terlaksanakan sesuai dengan target kegiatan, akan tetapi di Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia ada narasumber yang dari pelaksana kegiatan dibayarkan hanya 50% serta pada kegiatan Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada pagu SIPD mempunyai standar yang tinggi dari pajak sebenarnya dan pada kegiatan Belanja Lembur terdapat kelebihan perhitungan pagu belanja lemburnya.
- Pada penyerapan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi terdapat hutang di belanja jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar 4% pada bulan November dan desember serta adanya kelebihan anggaran pada iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian dari adanya tenaga Non ASN yang keluar/berhenti.

3.1.2.b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp.488.974.713,00 atau 97,73% dari anggaran Rp.500.347.000,00 dan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.321.014.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	TA. 2022		%	TA. 2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Peralatan dan Mesin	Rp.310.847.000,00	Rp.309.443.050,89	99,55	Rp.21.134.400,00
Gedung dan Bangunan	Rp.182.000.000,00	Rp.179.531.662,11	98,64	Rp.200.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	Rp.7.500.000,00	Rp.0,00	0,00	Rp.0,00
Jumlah	Rp.500.347.000,00	Rp.488.974.713,00	97,73	Rp.321.014.400,00

3.1.2.b.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin T.A 2022 sebesar Rp.310.847.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.309.443.050,89 atau 99,55% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.403.949,11 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Modal Alat Kantor	138.950.000,00	138.320.473,89	629.526,11	99,55
	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	39.960.000,00	40.000,00	99,90
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	98.950.000,00	98.360.473,89	589.526,11	99,40
2.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	32.177.000,00	31.850.177,00	326.823,00	98,98
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya(HomeUse)	32.177.000,00	31.850.177,00	326.823,00	98,98
3.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.130.000,00	15.130.000,00	0,00	100,00

	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	100,00
4.	Belanja Modal Komputer Unit	109.200.000,00	109.002.000,00	198.000,00	99,82
	Belanja Modal Personal Computer	109.200.000,00	109.002.000,00	198.000,00	99,82
5.	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.390.000,00	15.140.400,00	249.600,00	98,38
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.890.000,00	6.648.900,00	241.100,00	96,50
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.500.000,00	8.491.500,00	8.500,00	99,90
	Jumlah	310.847.000,00	309.443.050,89	1.403.949,11	99,55

3.1.2.b.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan T.A 2022 sebesar Rp.182.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.179.531.662,11 atau 98,64% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.468.337,89 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	182.000.000,00	179.531.662,11	2.468.337,89	98,64
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	182.000.000,00	179.531.662,11	2.468.337,89	98,64
	Jumlah	182.000.000,00	179.531.662,11	2.468.337,89	98,64

3.1.2.b.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya T.A 2022 sebesar Rp.7.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.7.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Modal Tanda Penghargaan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
	Jumlah	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00

Keterangan :

- Pada Belanja Modal Tanda Penghargaan terdapatnya kekeliruan perencanaan dimana yang direncanakan untuk pemberian piagam dibebankan pada belanja modal yang seharusnya tidak boleh.

3.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.2.1 Pendapatan – LO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel, ditargetkan dalam pendapatan asli daerah pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO dengan nilai pendapatan retribusi daerah sebesar Rp.12.840.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

3.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam masa pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau ekonomi aset atau timbulnya kewajiban. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, nilai beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.12.158.001.737,04 yang terbagi pada Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

3.2.2.a. Beban Operasi

Saldo Beban Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.11.479.394.181,16 yang terdiri dari :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.7.114.386.302,00 yang terdiri atas :

1. Beban Gaji Pokok PNS - LO	Rp.2.500.468.744,00
2. Beban Gaji Pokok PPPK - LO	Rp. 66.087.200,00
3. Beban Tunjangan Keluarga PNS - LO	Rp. 220.001.404,00
4. Beban Tunjangan Keluarga PPPK - LO	Rp. 6.287.344,00
5. Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	Rp. 137.769.800,00
6. Beban Tunjangan Fungsional PNS – LO	Rp. 59.269.960,00
7. Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	Rp. 88.760.000,00
8. Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK - LO	Rp. 4.360.000,00
9. Beban Tunjangan Beras PNS - LO	Rp. 133.759.740,00
10. Beban Tunjangan Beras PPPK - LO	Rp. 5.214.240,00
11. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	Rp. 11.626.489,00
12. Beban Pembulatan Gaji PNS - LO	Rp. 36.064,00
13. Beban Pembulatan Gaji PPPK - LO	Rp. 1.796,00
14. Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LO	Rp. 102.799.838,00
15. Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK - LO	Rp. 2.685.704,00
16. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	Rp. 5.128.344,00
17. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK - LO	Rp. 138.782,00
18. Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	Rp. 15.385.196,00
19. Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK - LO	Rp. 416.353,00
20. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	Rp.3.754.189.304,00

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.365.007.879,16 yang terdiri atas :

b.1. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan nilai beban persediaan periode T.A. 2022 sebesar Rp.1.852.364.147,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1.	Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 129.339.250,00
2.	Beban Alat Tulis Kantor	Rp. 342.652.905,00
3.	Beban Kertas dan Cover	Rp. 1.350.000,00
4.	Beban Cetak	Rp. 157.514.019,00
5.	Beban Bahan Komputer	Rp. 55.966.725,00
6.	Beban Perabot Kantor	Rp. 816.100,00
7.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.048.604.400,00

8.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp.	74.040.748,00
9.	Beban Pakaian KORPRI	Rp.	42.080.000,00
	JUMLAH	Rp.	1.852.364.147,00

b.2. Beban Jasa

Beban jasa merupakan nilai beban jasa periode T.A. 2022 sebesar Rp.845.377.654,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 139.700.000,00
2.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 409.600.007,00
3.	Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp. 4.800.000,00
4.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 69.583.372,00
5.	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp. 49.900.000,00
6.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Rp. 100.000.000,00
7.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp. 2.400.000,00
8.	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Rp. 10.428.275,00
9.	Beban Lembur	Rp. 58.966.000,00
	JUMLAH	Rp. 845.377.654,00

b.3. Beban Iuran Jaminan

Beban Iuran Jaminan merupakan nilai beban iuran jaminan periode T.A. 2022 sebesar Rp.34.550.960,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp. 32.164.160,00
2.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	Rp. 1.060.800,00
3.	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Rp. 1.326.000,00
	JUMLAH	Rp. 34.550.960,00

b.4. Beban Sewa

Beban Sewa merupakan nilai beban sewa periode T.A. 2022 sebesar Rp.14.500.000,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1.	Beban Sewa Audio Visual	Rp. 14.500.000,00
	JUMLAH	Rp. 14.500.000,00

b.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan nilai beban pemeliharaan periode T.A. 2022 sebesar Rp.115.497.070,16 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1.	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp. 64.816.550,00
2.	Beban Pemeliharaan Alat Pendingin	Rp. 7.860.000,00
3.	Beban Pemeliharaan Personal Computer	Rp. 6.000.000,00

4.	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	Rp.	5.000.000,00
5.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	Rp.	31.820.520,16
	JUMLAH	Rp.	115.497.070,16

b.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan nilai beban perjalanan dinas periode

T.A. 2022 sebesar Rp.1.502.718.048,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.499.059.668,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp. 3.658.380,00
	JUMLAH	Rp. 1.502.718.048,00

3.2.2.b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan nilai beban penyusutan dan amortisasi periode T.A. 2022 sebesar Rp.678.607.555,88 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp. 291.624.029,24
2	Beban Penyusutan Mesin Ketik	Rp. 91.237.865,42
3	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	Rp. 6.250.000,00
4	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	Rp. 143.388.705,49
5	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	Rp. 39.042.142,93
6	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	Rp. 4.000.000,00
7	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan	Rp. 2.851.479,58
8	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	Rp. 333.333,22
9	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	Rp. 99.880.000,00
	Jumlah	Rp.678.607.555,88

Dalam pos-pos laporan Keuangan terdapat selisih realisasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) yang dijabarkan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	Rp. 12.127.012.879,89
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp. 721.786,00
2	Alat Tulis Kantor	Rp. 1.290.550,00
3	Beban Perabot Kantor	Rp. 816.100,00
4	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 5.271.920,00
5	Belanja Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II	(Rp. 198.564.861,89)
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	Rp. 31.820.520,16
7	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(Rp. 39.960.000,00)
8	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp. 291.624.029,24
9	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	(Rp. 98.360.473,89)
10	Beban Penyusutan Mesin Ketik	Rp. 91.237.865,42

11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(Rp. 31.850.177,00)
12	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	Rp. 6.250.000,00
13	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	(Rp. 13.500.000,00)
14	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	Rp. 143.388.705,49
15	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	(Rp. 1.630.000,00)
16	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	Rp. 39.042.142,93
17	Belanja Modal Personal Computer	(Rp. 109.002.000,00)
18	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	Rp. 4.000.000,00
19	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	(Rp. 6.648.900,00)
20	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan	Rp. 2.851.479,58
21	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	(Rp. 8.491.500,00)
22	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	Rp. 333.333,22
23	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	(Rp. 179.531.662,11)
24	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	Rp. 99.880.000,00
LAPORAN OPERASIONAL (LO)		Rp. 12.158.001.737,04

Begitu juga dalam laporan Keuangan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Belanja Operasi dengan Laporan Operasional (LO) pada Beban Operasi yang dijabarkan sebelumnya terdapat selisih realisasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
LRA BELANJA OPERASI		Rp. 11.638.038.166,89
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp. 721.786,00
2	Alat Tulis Kantor	Rp. 1.290.550,00
3	Beban Perabot Kantor	Rp. 816.100,00
4	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 5.271.920,00
5	Belanja Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II	(Rp. 198.564.861,89)
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	Rp. 31.820.520,16
LO BEBAN OPERASI		Rp. 11.479.394.181,16

3.3. NERACA

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

3.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TA. 2022	TA. 2021
Aset Lancar	Rp. 20.782.850,00	Rp. 22.073.400,00
Aset Tetap	Rp. 4.613.451.194,68	Rp. 4.492.309.322,57
Jumlah Aset	Rp. 4.634.234.044,68	Rp. 4.614.262.722,57

Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran di muka, dan pendapatan. Laporan posisi keuangan atau neraca selalu menyajikan informasi tentang aset lancar dan komponen-komponennya dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TA. 2022	TA. 2021
Persediaan	Rp. 20.782.850,00	Rp. 22.073.400,00
Jumlah Aset Lancar	Rp. 20.782.850,00	Rp. 22.073.400,00

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.613.451.194,84 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.492.309.322,57 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TA. 2022	TA. 2021
Tanah	Rp. 950.000.000,00	Rp. 950.000.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp. 4.546.926.150,89	Rp. 4.238.299.200,00
Gedung dan Bangunan	Rp. 3.233.375.303,84	Rp. 2.887.099.300,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 105.725.850,00	Rp. 105.725.850,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. 4.222.576.110,05	Rp. 3.688.815.027,43
Jumlah Aset Tetap	Rp. 4.613.451.194,68	Rp. 4.492.309.322,57

Dengan rincian tersebut diatas, Aset Tetap dapat dirincikan dengan komponen sebagai berikut :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	TANAH	950.000.000,00	-	-	-	950.000.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	4.238.299.200,00	309.443.050,89	103.773.900,00	104.590.000,00	4.546.926.150,89
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.887.099.300,00	179.531.662,11	1.565.860.661,89	1.399.116.320,16	3.233.375.303,84
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	105.725.850,00	-	-	-	105.725.850,00
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-
6	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(3.688.815.027,43)	(578.727.555,88)	-	(44.966.473,26)	(4.222.576.110,05)
TOTAL		4.492.309.322,57	(89.752.842,99)	1.669.634.561,89	1.458.739.846,90	4.613.451.194,68

1. Tanah

Tanah Merupakan nilai Aset Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp.950.000.000,00 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Tanah Bangunan Perumahan	950.000.000,00	-	-	-	950.000.000,00
TOTAL		950.000.000,00	-	-	-	950.000.000,00

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Merupakan nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.546.926.150,89 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat Angkutan	2.316.518.200,00	-	-	-	2.316.518.200,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	813.917.560,00	185.300.650,89	65.645.400,00	96.098.500,00	968.765.110,89
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	54.000.000,00	-	-	-	54.000.000,00
4	Komputer	1.053.863.440,00	124.142.400,00	38.128.500,00	8.491.500,00	1.207.642.840,00
TOTAL		4.238.299.200,00	309.443.050,89	103.773.900,00	104.590.000,00	4.546.926.150,89

Ket :

- Bertambah :

- Reklasifikasi dikarenakan kesalahan kode rekening belanja barang pada alat kantor dan rumah tangga yang terdiri dari :
 - Reklas dari Alat kantor lainnya kode : 1.3.02.05.01.0005 ke Meubelair kode : 1.3.02.05.02.0001 Rp.2.963.700,00
 - Reklas dari Alat kantor lainnya kode : 1.3.02.05.01.0005 ke Meubelair kode : 1.3.02.05.02.0001 Rp.2.963.700,00
 - Reklas dari Alat kantor lainnya kode : 1.3.02.05.01.0005 ke Alat rumah tangga lainnya (Home Use) kode : 1.3.02.05.02.0006 Rp.19.758.000,00
 - Reklas Alat penyimpanan perlengkapan kantor kode : 1.3.02.05.01.0004 ke Alat pendingin kode : 1.3.02.05.02.0004 Rp.27.972.000,00
 - Reklas Alat penyimpanan perlengkapan kantor kode : 1.3.02.05.01.0004 ke Alat pendingin kode : 1.3.02.05.02.0004 Rp.11.988.000,00
- Reklasifikasi dikarenakan kesalahan kode rekening belanja barang pada Komputer yang terdiri dari :
 - Reklas dari Alat kantor lainnya kode : 1.3.02.05.01.0005 ke Peralatan mainframe kode : 1.3.02.10.02.0001 Rp.29.637.000,00
 - Reklas dari Peralatan komputer lainnya kode : 1.3.02.10.02.0005 ke Peralatan personal komputer kode : 1.3.02.10.02.0003 Rp.8.491.500,00

- Berkurang :

- Reklasifikasi dikarenakan kesalahan kode rekening belanja barang pada alat kantor dan rumah tangga yang terdiri dari :
 - Reklas Alat pendingin kode : 1.3.02.05.02.0004 ke Alat penyimpanan perlengkapan kantor kode : 1.3.02.05.01.0004 Rp.27.972.000,00
 - Reklas Alat pendingin kode : 1.3.02.05.02.0004 ke Alat penyimpanan perlengkapan kantor kode : 1.3.02.05.01.0004 Rp.11.988.000,00
 - Reklas dari Meubelair kode : 1.3.02.05.02.0001 ke Alat kantor lainnya kode : 1.3.02.05.01.0005 Rp.2.963.700,00
 - Reklas dari Meubelair kode : 1.3.02.05.02.0001 ke Alat kantor lainnya kode : 1.3.02.05.01.0005 Rp.2.963.700,00
 - Reklas dari Alat rumah tangga lainnya (Home Use) kode : 1.3.02.05.02.0006 ke Alat kantor lainnya kode : 1.3.02.05.01.0005 Rp.19.758.000,00
 - Reklas dari Peralatan mainframe kode : 1.3.02.10.02.0001 ke Alat kantor lainnya kode : 1.3.02.05.01.0005 Rp.29.637.000,00
 - Reklas keluar Alat rumah tangga lainnya (Home Use) Rp.436.100,00
 - Reklas keluar Lemari dan arsip pejabat Rp.380.000,00
- Reklasifikasi dikarenakan kesalahan kode rekening belanja barang pada Komputer yang terdiri dari :
 - Reklas dari Peralatan personal komputer kode : 1.3.02.10.02.0003 ke Peralatan komputer lainnya kode : 1.3.02.10.02.0005 Rp.8.491.500,00

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan nilai bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.233.375.304,00 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Bangunan Gedung	2.687.099.300,00	179.531.662,11	1.565.860.661,89	1.399.116.320,16	3.033.375.303,84
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00
TOTAL		2.887.099.300,00	179.531.662,11	1.565.860.661,89	1.399.116.320,16	3.233.375.303,84

Ket :

- Bertambah :

- Kapitalisasi dikarenakan kesalahan rekening belanja dari belanja pemeliharaan ke renovasi rumah negara gol II pada bangunan gedung terdiri dari :
 - Belanja pemeliharaan bangunan tempat tinggal rumah negara gol II kode : 5.1.02.03.03.0039 ke rumah negara gol II kode : 1.3.03.01.02.0002 Rp.187.048.611,89
 - Belanja pemeliharaan bangunan tempat tinggal rumah negara gol II kode : 5.1.02.03.03.0039 ke rumah negara gol II kode : 1.3.03.01.02.0002 Rp.6.743.250,00
 - Belanja pemeliharaan bangunan tempat tinggal rumah negara gol II kode : 5.1.02.03.03.0039 ke rumah negara gol II kode : 1.3.03.01.02.0002 Rp.4.773.000,00
- Reklasifikasi aset berdasarkan LHP BPK No.50.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 30 mei 2022 bangunan gedung tempat pertemuan kode : 1.2.03.01.01.0009 Rp.1.172.971.800,00
- Reklasifikasi aset berdasarkan surat keterangan kapitalisasi dan reklasifikasi No.032/1149/Disdukcapil bangunan gedung kantor permanen kode : 1.3.3.01.01.01.001 ke :
 - Bangunan gudang kode : 1.2.03.01.01.0002 (Bangunan kantor gedung pelayanan) Rp.119.574.000,00
 - Bangunan gudang terbuka kode : 1.3.03.01.01.0002 (Bangunan kantor gedung pelayanan) Rp.74.750.000,00

- Berkurang :

- Reklasifikasi aset berdasarkan LHP BPK No.50.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 30 mei 2022 bangunan gedung tempat pertemuan kode : 1.2.03.01.01.0009 Rp.1.172.971.800,00
- Reklasifikasi aset berdasarkan surat keterangan kapitalisasi dan reklasifikasi No.032/1149/Disdukcapil bangunan gedung kantor permanen kode : 1.3.3.01.01.01.001 ke :
 - Bangunan gudang kode : 1.2.03.01.01.0002 (Bangunan kantor gedung pelayanan) Rp.119.574.000,00
 - Bangunan gudang terbuka kode : 1.3.03.01.01.0002 (Bangunan kantor gedung pelayanan) Rp.74.750.000,00
 - Pemeliharaan gudang terbuka permanen Rp.31.820.520,16

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan merupakan nilai instalasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.105.725.850,00 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-22	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2022		SALDO AKHIR 31-Des-22
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Instalasi	95.725.850,00	-	-	-	95.725.850,00
2	Jaringan	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
TOTAL		105.725.850,00	-	-	-	105.725.850,00

Aset Lainnya

1. Aset Tetap Lainnya

• Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	0,00
• Aset Tak Berwujud T.A. 2022	Rp.	<u>99.880.000,00</u>
Jumlah	Rp.	99.880.000,00

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.222.576.110,05 terdiri dari :

NO	SKPD	SALDO AWAL 1 Januari 2022	PENYUSUTAN 1 JAN S/D 31 DES 2022			SALDO AKHIR 31 Desember 2022
			PENYUSUTAN 2022	BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Peralatan dan Mesin	(2.734.944.254,85)	(532.500.600,15)	-	-	(3.267.444.855,00)
2	Gedung dan Bangunan	(920.989.093,98)	(43.042.142,93)	-	(44.966.473,26)	(919.064.763,65)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(32.881.678,60)	(3.184.812,80)	-	-	(36.066.491,40)
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah		(3.688.815.027,43)	(578.727.555,88)	-	(44.966.473,26)	(4.222.576.110,05)

Ket :

- Berkurang :

1. Koreksi awal atas penggabungan aset gedung dan bangunan pada penyusutan dikarenakan adanya LHP BPK No.50.B/LHP.XIX.MKS/05/2022 tanggal 30 mei 2022 yaitu akumulasi penyusutan bangunan gedung kode : 1.3.07.02.01.0001 dengan nilai Rp.44.966.473,26

3.3.2. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan Penilaian Utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan.

Berikutnya adalah Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Beban yaitu :

- Utang Beban Gaji dan Tunjangan Rp.318.025.712,00

Ket : Dimana utang beban tersebut merupakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember tahun 2022 yang akan dibayarkan pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp.312.753.792,00 dan utang iuran jaminan kesehatan Non-ASN dengan nilai sebesar Rp.5.271.920,00

b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang belum disetor di Kas Negara per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

3.3.3. Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan pos Neraca Pemerintah yang menumpang selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah.

Ekuitas	Rp.	(7.797.964.547,21)
RK PPKD	Rp.	<u>12.114.172.879,89</u>
Jumlah Ekuitas	Rp.	4.316.208.332,68
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp.	4.634.234.044,68

3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus.defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir. Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022:

Ekuitas Awal	Rp.	(8.691.915.319,88)
Surplus/Defisit-LO	Rp.	(12.145.161.737,04)
Rekening Konsolidasi (RK)	Rp.	12.994.146.036,45
Koreksi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	44.966.473,26
Ekuitas Akhir	Rp.	(7.797.964.547,21)

Rekening Koran PPKD

Rekening Koran PPKD adalah merupakan :

Saldo awal 1 januari 2022	Rp.	0,00
SP2D LS	Rp.	9.368.848.657,89
SP2D UP/GU/TU	Rp.	2.787.597.500,00
Penyetoran Sisa Kas	Rp.	(69.931.130,00)
JUMLAH RK PPKD	Rp.	12.086.515.027,89

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. Struktur Organisasi OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Tlp. No. 0411-434164, Fax No. 0411-454604 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dapat disampaikan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, meliputi:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Kerja Sama, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Kordinator Monitoring dan Evaluasi.
5. Jabatan Fungsional.

B. Tugas dan Fungsi OPD

a. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan di dukung oleh Pejabat dan staf yang terbagi antara PNS dengan jumlah 49 orang dan PPPK dengan jumlah 3 orang yang terdiri dari :

- Jumlah PNS yaitu :
 - Gol. IV = 12 org
 - Gol. III = 32 org
 - Gol. II = 5 org
- Jumlah PPPK yaitu :
 - Kls. 09 = 1 org
 - Kls. 07 = 2 org

D. Visi dan Misi

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi, Seimbang dan Sejahtera".

b. Misi

1. Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima dan akuntabel;
2. Mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi Sumber Daya Manusia, teknologi informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta sarana pendukung lainnya.

E. Program dan Kegiatan OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 5 Program, 17 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - 1.2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5.6. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Mebel
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

- 1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pendaftaran Penduduk:
 - 2.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - 2.1.1. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
 - 2.1.2. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 2.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 2.2.1. Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 2.3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 2.3.1. Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil:
 - 3.1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - 3.1.1. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
 - 3.1.2. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
 - 3.2. Pemberiaan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 3.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:
 - 4.1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4.1.1. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan Yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 4.2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 4.2.1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4.2.2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - 4.3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 4.3.1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4.3.2. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan:
 - 5.1. Penyediaan Profil Kependudukan
 - 5.1.1. Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

BAB V

PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Laporan Realisasi Anggaran :

- Realisasi Belanja Daerah	Rp. 12.127.012.879,89
Belanja Operasi	Rp. 11.638.038.166,89
Belanja Modal	Rp. 488.974.713,00

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa.